



## Problematika antara Internalisasi dan Indoktrinasi Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Suprayogi <sup>a,1\*</sup>, Eni Rahmawati <sup>a,2</sup>, Hafidz Rafi'uddin <sup>a,3</sup>, Giri Harto Wiratomo <sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

<sup>1</sup> [suprayogi@mail.unnes.ac.id](mailto:suprayogi@mail.unnes.ac.id)\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 22 Juni 2024;

Revised: 24 Juni 2024;

Accepted: 29 Juni 2024.

### Kata-kata kunci:

Nilai Pancasila;  
Ideologisasi;  
Pendidikan  
Kewarganegaraan.

---

### ABSTRAK

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah diintegrasikan secara terpadu. Proses internalisasi ini sering kali dipandang sebagai bentuk indoktrinasi yang telah berlangsung sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui proses ideologisasi yang disosialisasikan dan diimplementasikan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan literature review serta wawancara dengan pendidik dan pakar Pendidikan Kewarganegaraan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai suatu bangsa. Penelitian ini mengungkapkan perubahan signifikan dalam pendekatan dan fokus internalisasi atau indoktrinasi Pancasila dari zaman ke zaman. Pada masa Orde Lama, penanaman nilai Pancasila cenderung lebih ketat dan menekankan ketaatan terhadap pemerintah Orde Lama. Di era Orde Baru, ideologisasi Pancasila lebih berfokus pada penggunaannya sebagai alat untuk mengontrol masyarakat serta menekan keberagaman ideologi. Namun, selama periode reformasi, terjadi pergeseran paradigma yang lebih inklusif dan menghargai pluralitas dalam pengajaran nilai-nilai Pancasila.

---

### ABSTRACT

---

### Keywords:

Pancasila's Values;  
Ideologization;  
Civics Education.

**Problems Between Internalization and Indoctrination of Pancasila Values in Civic Education Learning.** Internalization of Pancasila values is integrated into Civic Education learning. Internalization of Pancasila values is considered by many as an indoctrination carried out since the Old Order, New Order, and Reformation era. The purpose of this study is to examine the internalization of Pancasila values through the process of Pancasila ideologization which is socialized and implemented in Civic Education learning. The research method used is qualitative with a literature review approach and interviews with educators and Civic Education experts. The research locus was conducted in the cities of Semarang, Yogyakarta, and Jakarta. The results of the study show that Pancasila values in Civic Education learning are part of the internalization and socialization of the values of a nation. Based on the results of this study, significant changes in the approach and focus of internalization or indoctrination of Pancasila from one era to another were revealed. During the Old Order, the instillation of Pancasila values tended to be strict and emphasized more on aspects of obedience to the Old Order government. During the New Order, the ideologization of Pancasila was more instrumental and was used to control society and suppress ideological diversity. However, during the Reformation era, there was a paradigm shift that was more inclusive and valued plurality in teaching Pancasila values.

---

Copyright © 2024 (Suprayogi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Suprayogi, S., Rahmawati, E., Rafi'uddin, H., & Wiratomo, G. H. (2024). Penanaman Nilai Pancasila Melalui Ideologisasi Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 98–106. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10347>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Pancasila dikenal sebagai fondasi negara Indonesia yang dirumuskan sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Hardianto, 2017; Isdiyanto, 2021). Sejak awal perumusannya, Pancasila digunakan sebagai landasan falsafah negara oleh para pendiri bangsa (Unggul et al., 2022). Untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ini, dibentuklah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Perdana (2018) menjelaskan bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila ditempatkan bukan hanya sebagai instrumen pendidikan politik tetapi juga sebagai alat politik kekuasaan. Pancasila, sebagai ideologi negara, mengalami berbagai format yang berubah seiring dengan perkembangan zaman (Sudrajat, 2016). Sebagai tambahan, Pendidikan Kewarganegaraan dianggap penting dalam membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*), dengan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian integral dari materi pembelajarannya. Tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengenalkan serta menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga negara.

Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut melalui ideologisasi Pancasila dalam kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Ideologisasi berbeda dengan indoktrinasi, meskipun di dalam ideologisasi terdapat indoktrinasi (Narmoatmojo, 2017). Lebih lanjut, Sukarno menjelaskan perbedaan antara *weltanschauung* yang identik dengan ideologi. Fadilah (2019), menjelaskan ideologi berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Pendapat Winataputra (2016) menjelaskan untuk mempelajari epistemologis Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikaji dengan pendekatan historis-epistemologis. Pendidikan Kewarganegaraan identik dengan pembentukan karakter warga negara. Pembinaan karakter moral Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan dari masa ke masa mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi strategi penanaman nilai. Asyafiq (2016), menjelaskan strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai yaitu belajar tuntas, belajar bebas, dan belajar saintifikasi.

Permasalahan bangsa Indonesia dapat berawal dari mudurnya karakter warga negara karena kurang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maftuh (2008) menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yaitu: (1) nilai-nilai Pancasila belum membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh warga negara; (2) kehidupan warga negara yang mendapat pengaruh yang kuat dari budaya luar; (3) nasionalisme mengalami erosi; (4) paham keagamaan yang tidak mengakomodasi negara kebangsaan; dan (5) peran pendidikan non formal dan formal. Pada era Orde Lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perlunya kewarganegaraan. Era orde baru 1966 membawa kepada implementasi nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Pemerintahan Orde Baru runtuh kemudian digantikan era reformasi. Bergulirnya era reformasi 1998 membawa bangsa Indonesia ke iklim demokrasi yang lebih mengacu kebebasan. Winataputra (2001) menjelaskan jati diri dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk pendidikan demokrasi. Beragam permasalahan kebangsaan kemudian banyak sekali bermunculan seperti degradasi moral, radikalisme, fundamentalisme, terorisme, disintegrasi sosial, dan korupsi. Sejak era reformasi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berubah dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Format model Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sangat diinginkan oleh publik di era reformasi ini. Mereka menginginkan pembinaan moral Pancasila dengan model baru yang lebih akomodatif. Sejak reformasi, ideologi Pancasila ibarat barang usang, meskipun berisikan norma-norma moral yang berasal dari kearifan lokal (Malik, 2020). Pada saat Orde Baru, indoktrinasi moral Pancasila dirasakan sebagian pandangan masyarakat terkesan monoton dan terlalu ke arah hanya pembelajaran kognitif. Sementara sisi lain, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kematangan akademik dalam historis-epistemologisnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan mengulas ideologisasi Pancasila dalam tiga zaman yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi (Handayani et al, 2023).

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dianggap sebagai indoktrinasi politik dan tafsir tunggal atas Pancasila saat Orde Baru. Reformasi 1998 memunculkan tiga kutub pemikiran, ada yang berupaya menghilangkan Pancasila karena dianggap produk legitimasi Orde Baru, mengusulkan Pancasila versi Trisila, dan mengusulkan kembali ke Piagam Jakarta. Kemudian, kecenderungan tuduhan P4 dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pada masa Orde Baru. Pertama, P4 yang masih massif menyebabkan tidak boleh mengulang menciptakan P4 sebagai sarana indoktrinasi politik dan monopoli negara atas tafsir Pancasila. Kedua, menyesuaikan sistem pembinaan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kontemporer. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penanaman nilai Pancasila dalam membentuk karakter warga negara Indonesia melalui Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Haq (2022) dan Firmansyah (2021) menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan Pendidikan Kewarganegaraan, dan Firmansyah secara khusus mengatasi terkikisnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Juri et al (2020) dan Asyafiq (2016) lebih mendalami pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dengan Juri et al (2020) fokus pada pemahaman siswa dan Asyafiq membahas perlunya pendekatan yang efektif dalam pembentukan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

## Metode

Metode penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review* dan wawancara dengan dua pakar Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini mengkaji internalisasi nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada 3 era yaitu orde baru, orde lama, dan era reformasi. Kemudian dalam wawancara menggunakan informan A dan Informan B. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Uji validitas data/keabsahan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan alur model interaktif Milles dan Huberman: pengumpulan data, penyajian data, reduksi, dan verifikasi untuk tiba pada penarikan kesimpulan.

## Hasil dan pembahasan

Internalisasi nilai Pancasila melalui ideologisasi Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya di masyarakat serta pergantian rezim. Perdana (2018) menjelaskan kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sangat berpengaruh. Perubahan pendekatan dari zaman ke

zaman mencerminkan perkembangan dan transformasi Indonesia sebagai negara demokratis. Berdasarkan wawancara, Informan A mengungkapkan demikian, "seringkali banyak tokoh menyamakan antara internalisasi dengan indoktrinasi." (Informan A, 2023, Juni 19, Senin, pukul 10.00 WIB). Pengalaman dari masa lampau menunjukkan bahwa ideologisasi Pancasila yang otoriter dan represif tidak lagi sesuai dengan semangat reformasi dan tuntutan masyarakat yang semakin terbuka dan inklusif.

Pada Orde Lama dibatasi dari tahun 1959 hingga 1966 yang dipimpin oleh Soekarno. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Darmadi (2020) menjelaskan pada awal Orde Lama pendidikan memiliki kecenderungan politis. Ditambahkan, Maftuh (2008) menjelaskan upaya menginternalisasikan Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintah Sukarno dalam kerangka *nation and character building*. Dengan adanya ideologisasi Pancasila tersebut melalui pendidikan akan meng-Indonesiakan orang Indonesia dengan cara Manipol/Usdek. Madiung et al (2018) menjelaskan pada tahun 1957 Pendidikan Kewarganegaraan saat pemerintahan Sukarno dikenal dengan istilah *Civics* yang diperkenalkan ke sekolah-sekolah. Kemudian diimplementasikan dalam kurikulum tahun 1961. Madiung et al (2018) menjelaskan pula pada tahun 1955 telah terbit buku kewarganegaraan berjudul "Inti Pengetahuan Warga Negara". Sementara itu, tujuan pelajaran tersebut yaitu untuk membangkitkan dan memelihara keinsyafan dan kesadaran bahwa warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara (*good citizenship*). Perdana (2018), tafsir tentang warga negara yang baik yaitu warga negara yang berjiwa revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Materi dalam buku tersebut terdiri atas tanah airku, Indonesia Raya, bendera dan lambang negara, warga negara beserta hak dan kewajibannya, ketatanegaraan, keuangan negara, pajak, dan perekonomian, termasuk koperasi. Ideologisasi Pancasila dalam masa Orde Lama melalui pendekatan politik, pendidikan, dan sosial.

Pada periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966 di bawah kepemimpinan Soekarno, dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin, pendidikan memainkan peran krusial dalam proses ideologisasi Pancasila untuk membangun karakter dan kesadaran nasional. Darmadi (2020) mengindikasikan bahwa pendidikan pada masa ini cenderung terpolitisasi, dengan upaya yang dilakukan untuk menginternalisasikan Pancasila dalam kerangka *nation and character building*, seperti yang dijelaskan oleh Maftuh (2008). Konsep ini, dikenal dengan Manipol/Usdek, bertujuan untuk meng-Indonesiakan warga negara Indonesia. Madiung et al. (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 1957, pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan sebagai *Civics* di sekolah-sekolah, yang kemudian diimplementasikan dalam kurikulum pada tahun 1961. Langkah ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran bahwa warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara (*good citizenship*), sebagaimana yang dijelaskan dalam buku kewarganegaraan Inti Pengetahuan Warga Negara yang diterbitkan pada tahun 1955. Perdana (2018) memberikan tafsir bahwa warga negara yang baik pada masa itu adalah yang memiliki jiwa revolusioner, anti-imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Materi dalam buku kewarganegaraan tersebut mencakup isu-isu seperti tanah air, lambang negara, hak dan kewajiban warga negara, ketatanegaraan, keuangan negara, pajak, dan ekonomi termasuk koperasi. Dengan pendekatan politik, pendidikan, dan sosial, ideologisasi Pancasila dalam masa Orde Lama berupaya membangun fondasi moral dan nasionalisme yang kokoh di kalangan warga negara Indonesia.

Salah satu ciri khas ideologisasi Pancasila pada era Orde Lama adalah diperkenalkannya tafsir Pancasila melalui persatuan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) oleh Soekarno. Nasakom bertujuan untuk menyatukan tiga kekuatan besar di Indonesia, yaitu

kelompok nasionalis, agamis, dan komunis, dalam upaya membangun negara yang kokoh dan merdeka. Madiong et al (2018) menjelaskan pada tahun 1961 istilah Kewarganegaraan diganti dengan Kewargaaan Negara dengan alasan menyesuaikan Pasal 26 Ayat 2 UUD 1945 yang menekankan hak dan kewajiban warga negara. Ideologisasi Pancasila dalam era Orde Lama berperan penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai karakteristik unik yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Perdana (2018), pada buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* materinya terdiri atas Sejarah pergerakan/perjuangan rakyat Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Konferensi Asia Afrika, Kewajiban dan hak warga negara, Manifesto Politik, Laksana Malaikat dan lampiran-lampiran tentang Dekrit Presiden, lahirnya Pancasila, Pidato Presiden Sukarno, *Declaration of Human Rights* dan Panca Wardhana (lima perkembangan).

Dalam semangat nasionalisme dan Pancasila, upaya dibuat untuk mengintegrasikan berbagai kelompok etnis, bahasa, dan budaya yang beragam menjadi satu identitas nasional yang kokoh. Walaupun Pancasila menjadi ideologi negara, pada era Orde Lama terjadi juga tindakan represif terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam keutuhan Pancasila dan ideologi negara. Beberapa organisasi politik dan kelompok masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah seringkali dianggap sebagai ancaman dan ditindak dengan keras. Madiong et al (2018) menjelaskan pada tahun 1966 buku karya Supardo, dkk dilarang digunakan di sekolah dikarenakan mengandung tafsir Pancasila yang cenderung menguntungkan kelompok komunis. Madiong et al (2018), menjelaskan mengisi kekosongan tersebut digunakan materi Civics, yang materi terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Orde Baru, Sejarah Indonesia, dan Ilmu Bumi Indonesia.

Masa Orde Baru berlangsung mulai tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada periode ini, ideologisasi Pancasila menjadi lebih terpusat dan diarahkan oleh pemerintah untuk memperkuat Pancasila secara murni dan konsekuen. Darmadi (2020) menjelaskan Orde Baru ingin mengoreksi dan mengadakan introspeksi secara mendasar dan menyeluruh atas praktek Pancasila dan UUD 1945. Ditambahkan, Madiong et al (2018) menjelaskan pada tahun 1972 diselenggarakan Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics di Tawangmangu, Surakarta. Pada masa Orde Baru, Pancasila ditegaskan sebagai satu-satunya ideologi resmi negara Indonesia melalui Penetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Silvia (2019) menjelaskan pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang dikenal dengan Ekaprasetya Pancakarsa (P4). Pada tahun 1978 secara massif, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melalui Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P4 dan Penegasan Pancasila Dasar Negara. Morfit (1981) menjelaskan untuk penataran P4 dilaksanakan kurang lebih selama dua minggu.

Ideologisasi Pancasila dalam era Orde Baru mengakibatkan stabilitas dalam pembangunan ekonomi dan politik. Perdana (2018) menjelaskan ideologisasi Pancasila melalui pendidikan diarahkan kepada pembangunan. Ditambahkan, Darmadi (2020) menjelaskan setelah pemilu 1971, Orde Baru mengeluarkan pedoman umum pembangunan jangka panjang Tap MPR Nomor IV Tahun 1973 tentang GBHN. Pada masa Orde Baru, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam ideologisasi Pancasila. Kurikulum pendidikan diperkuat dengan pemahaman yang tunggal tentang Pancasila, seperti penggunaan asas tunggal. Darmadi (2020) menjelaskan sosialisasi Pancasila dimunculkan dalam mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berdasarkan Kurikulum 1975 dan 1984. Seluruh institusi pendidikan, mulai dari

---

sekolah dasar hingga perguruan tinggi, harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh kegiatan belajar-mengajar. Kebudayaan (1976) menjelaskan tentang Buku II.B yang berisi GBPP Kurikulum SD 1975 untuk bidang studi Pendidikan Moral Pancasila terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pertama tentang tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan pokok bahasan; bagian kedua tentang pokok bahasan dan sub pokok bahasan menurut tingkat/kelas, dan bagian ketiga tentang bahan pengajaran.

Pemerintah Orde Baru mendirikan lembaga dan organisasi kebudayaan yang disusun berdasarkan garis ideologis Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memperkuat citra dan identitas nasional, serta menekankan keutuhan Pancasila sebagai perekat kesatuan bangsa. Ideologisasi Pancasila pada masa Orde Baru mampu menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam jangka waktu tertentu. Morfit (1981) menjelaskan. dengan mengedepankan Pancasila sebagai pegangan tunggal, pemerintah dapat mengendalikan opini publik, sehingga mengurangi potensi konflik politik. Maftuh (2008) menjelaskan pengembang penataran P4 sudah menggunakan berbagai cara dan metode yang lebih baik dari sekedar indoktrinasi. Namun, kritik terhadap ideologisasi Pancasila pada masa Orde Baru juga cukup besar. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi mengakibatkan munculnya oposisi politik yang tertindas dan kurangnya ruang untuk perkembangan pluralisme politik. Penerapan ideologisasi yang kaku juga menyebabkan pembatasan inovasi dan berkurangnya ruang bagi pemikiran kritis, yang berdampak pada kemajuan intelektual masyarakat.

Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Pada awal reformasi penuh dengan kondisi yang kurang kondusif bagi pelaksanaan Pancasila. Periode ini ditandai dengan semangat perubahan politik, demokratisasi, dan upaya pemulihan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Berdasarkan informan A menyampaikan, "dikarenakan sebagai pandangan publik masih menganggap Pancasila sebagai produk orde baru..." (Informan A, 2023 Juni 20, Selasa, pukul 10.00 WIB). Berdasarkan Hartono (2017), menjelaskan pada era reformasi, pendidikan nilai-nilai karakter bangsa diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan budaya sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk dan memperkuat karakter bangsa secara holistik, menghindari sekedar pengetahuan atau indoktrinasi. Pendidikan karakter yang efektif harus didasarkan pada nilai-nilai budaya Indonesia yang mengakui keberagaman dalam kesatuan, seperti yang terwujud dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga universal, sehingga mampu membekali generasi muda Indonesia dengan landasan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.

Darmadi (2020) menjelaskan dalam naskah terakhir kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila masih merupakan sumber nilai-nilai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada masa Reformasi, terjadi perluasan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pemerintahan Reformasi memfasilitasi kemunculan beragam media massa dan organisasi masyarakat sipil yang aktif berbicara tentang berbagai isu, termasuk yang berkaitan dengan Pancasila dan ideologi negara. Setiawan (2014) perubahan itu juga terjadi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat sipil (*civil society*) dengan memberdayakan warga negara dalam sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dalam proses ideologisasi dan memberi kesempatan pada berbagai pandangan untuk didengar dan didiskusikan secara terbuka.

Oleh sebab itu, Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki porsi yang sedikit. Meskipun ada pertimbangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi. Pemunculan kembali hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Pembentukan UKP

yang kemudian diubah menjadi BPIP. Mata pelajaran PPKn diubah menjadi Pendidikan Pancasila melalui Kurikulum Merdeka. Dilanjutkan dengan pembuatan buku Pancasila yang baru untuk menggantikan buku pelajaran PPKn. Pendidikan kewarganegaraan pada masa Reformasi berusaha lebih kritis dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Ideologisasi Pancasila melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dilakukan oleh DPR banyak ditentang karena multitafsir. Daeli & Asbari (2022) menjelaskan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila berbahaya karena menghilangkan ruh ketuhanan dalam sila pertama. Selain itu, Darmadi (2020) ideologisasi Pancasila lebih dari sekadar hanya menghafal sila-sila Pancasila, melalui Pendidikan Kewarganegaraan mencoba untuk mendorong warga negara muda untuk memahami makna dan relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkannya dengan isu-isu sosial dan politik yang dihadapi bangsa.

Setelah hampir 10 tahun sejak reformasi 1998 dirasakan nilai-nilai Pancasila semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Pancasila dipinggirkan dalam pembahasan publik. Pada akhirnya dibentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila. Ideologisasi Pancasila di era ini mencakup pemahaman bahwa bangsa Indonesia terhadap toleransi dan pluralitas, seperti terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya, dan pentingnya menjaga keharmonisan dan kerukunan antarwarganegara yang berbeda. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai penghubung dalam upaya mengatasi potensi konflik dan memperkuat persatuan bangsa. Nanggala & Suryadi (2020) menjelaskan pendekatan baru yang digunakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam program kampus merdeka yaitu pertukaran pelajar, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, dan penelitian. Kemudian bentuk pembelajaran yang berfokus pada kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, proyek independen, dan KKN tematik atau membangun desa sejalan dengan pembangunan sosio-kultural ideologisasi Pancasila.

Pada masa Reformasi, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan perubahan dalam konteks global. Nurgiansah (2019) menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan harus mengikuti perkembangan zaman dengan pemutakhiran kurikulum. Globalisasi, teknologi informasi, dan pergantian pola pikir masyarakat membawa dampak pada ideologisasi Pancasila. Pemerintah dan masyarakat harus secara terus-menerus beradaptasi untuk menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Rachman, Nurgiansyah & Kabatiah (2021) menjelaskan profil Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 menggunakan istilah PPKn. Mata pelajaran ini menggunakan pendekatan pendekatan *education for citizenship* dengan kontinum maksimal dan diajarkan secara tematik terpadu dengan penguatan warga negara muda yang pancasilais, partisipatif, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hidayah & Hastangka (2023) menjelaskan wacana ideologisasi Pancasila sejak reformasi adalah pengakuan kehadiran dan imajinasi Pancasila warga negara muda yang lahir setelah 1998 yang nampaknya cukup berbeda dengan warga negara sebelumnya. Berdasarkan informan A menyatakan, "Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang diperebutkan untuk memasukan berbagai program pemerintah..." (Informan A, 2023, Juni 20, Selasa, pukul 10.00 WIB).

Lebih lanjut berdasarkan Informan B, menyampaikan demikian,

"... pada Kurikulum Merdeka, pendidikan karakter menggunakan istilah Profil Pelajar Pancasila (P5) yang terdiri atas 6 dimensi dan elemen nilai yaitu berakhlak mulia, berkebhinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif." (Informan B, 2023, Juni 26, Senin, pukul 14.00 WIB).

Hal ini kemudian, diperkuat kembali pada tahun 2024, Informan B menyatakan telah dilakukan perubahan nama mata pelajaran PPKn menjadi Pendidikan Pancasila melalui "Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah" ... (Informan B, 2023, Juli 24, Senin, pukul 10.00 WIB).

## Simpulan

Penelitian ini telah menggambarkan pasang surut ideologisasi Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia selama tiga zaman yang berbeda yaitu Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Era Reformasi (1998-sekarang). Internalisasi nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting bagian dari ideologisasi Pancasila. Dalam perkembangannya, penanaman nilai Pancasila dalam Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan menghadirkan format metode pembelajaran yang relevan untuk mengajarkan dan menanamkan nilai Pancasila secara mendalam kepada warga negara. Kesadaran nilai warga negara dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah yang berubah menjadi Pendidikan Pancasila di era reformasi perlu ditekankan pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, sambil menghargai keberagaman ideologi dan keyakinan dalam masyarakat. Guru dan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan harus mendukung diskusi terbuka dan kritis, memperkuat kesadaran kewarganegaraan tentang nilai Pancasila, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun negara yang lebih baik.

## References

- Asyafiq, S. (2016). *Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan*. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol 4 No 1, litabmas.umpo.ac.id, <http://litabmas.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/56>.  
<http://dx.doi.org/10.24269/dpp.v4i1.56>.
- Daeli, SI, & Asbari, M. (2022). *Bahaya Pancasila Menjadi Trisila dan Ekasila: Telaah Singkat Pemikiran Refly Harun*. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol 1 No 1. jupetra.org, <http://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/44>.  
<https://doi.org/10.9000/jupetra.viii.44>.
- Darmadi, H. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn): Konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila ....*, books.google.com.
- Fadilah, N. (2019). *Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. *Journal of Digital Education, Communication, and ...*, Vol 2 No 02. jurnal.polibatam.ac.id, <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/download/1546/895>. <https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546>.
- Firmansyah, MC. (2021). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa Sesuai Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora*, Vol 9 No 1. <https://doi.org/10.24815/PEAR.V9i1.20607>.
- Handayani, P et al. (2023). *Pancasila Dalam Lintasan Sejarah*. *Didaktik: Jurnal Ilmiah ...*, journal.stkipsubang.ac.id, Vol 8 No 2. <http://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/2155>. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v8i2.567>.
- Haq, R. (2022). *Pancasila sebagai Ideologi dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol 2 No 2. <https://doi.org/10.56393/didactica.v2i2.1149>.
- Hardinanto, A. (2017). *Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945*. *Veritas et Justitia*, journal.unpar.ac.id, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2524>.  
<https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2524>.
- Hartono, Y. (2017). *Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa Di Indonesia Dari Masa ke Masa*. *Jurnal Agastya*, Vol 7 No 01, <https://doi.org/10.25273/AJSP.V7i01.1059>.

- Hidayah, Y & Hastangka, H. (2023). *Analisis Bibliometrik Tren Penelitian tentang Pancasila Pasca Terbentuknya BPIP (2019-2023): Suatu Pendekatan Pendidikan*. Pancasila: Jurnal ..., [ejournalpancasila.bpip.go.id](http://ejournalpancasila.bpip.go.id), <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/152>.
- Isdiyanto, IY. (2021). *Dekonstruksi pemahaman Pancasila: Menggali jati diri hukum Indonesia*., books.google.com.
- Juri et al. (2020). *Analisis Pemahaman Siswa Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020*. 10.31932/jpk.v5i1.707.
- Kebudayaan, DP. (1976). *Kurikulum Sekolah Dasar 1975 GBPP Buku II. B Pendidikan Moral Pancasila*., repositori.kemdikbud.go.id, <https://repositori.kemdikbud.go.id/9254/>.
- Madiong, SH Baso, Mustapa, D Zainuddin, & Chakti, AGR. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*., books.google.com.
- Maftuh, B. (2008). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Educationist, file.upi.edu.
- Malik, A. (2020). *Membumikan Ideologi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangkitkan Nasionalisme*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, [Vol 6 No 1](https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4401). jurnal.umsu.ac.id, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/4401>. <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4401>.
- Morfit, M. (1981). *Pancasila: The Indonesian State Ideology According To The New Order Government*. Asian Survey, JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/2643886>. <https://doi.org/10.2307/2643886>.
- Nanggala, A, & Suryadi, K. (2020). *Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, [Vol 9 No 2](https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545). [ejournal.unisri.ac.id](http://ejournal.unisri.ac.id), <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/4545>. <https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545>.
- Narmoatmojo, Winarno. (2017). *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Surakarta: FKIP UNS.
- Nurgiansah, T. (2019). *Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. Konsep Kewarganegaraan Indonesia*", [digilib.unimed.ac.id](http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/37502), <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/37502>.
- Perdana, RY. (2018). *Mengenal Sejarah Pancasila*., osf.io, <https://osf.io/preprints/inarxiv/dmbpc/download>.
- Rachman, F, Nurgiansyah, TH, & Kabatiah, M. (2021). *Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia*. ... : Jurnal Ilmu Pendidikan, edukatif.org, [Vol 3 No 5](https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052). <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/1052>. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>.
- Salma, Badriyatus et al. (2022). *Studi Tentang Dinamika Pancasila Dari Masa Ke Masa*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, [Vol 4 No 03](https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/877), 130-136. Retrieved from <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/877>.
- Setiawan, D. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, [jurnal.unimed.ac.id](https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2285), <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/2285>. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2285>.
- Silvia, B. (2019). *Dari Pendidikan Kewargaan Negara ke Pendidikan Moral Pancasila: Perubahan Muatan Materi Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia Tahun ...*, [eprints2.undip.ac.id](https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4189/), <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4189/>.
- Sudrajat, A. (2016). *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, [Vol 8 No 1](http://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/10763). [journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/10763), <http://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/10763>. <http://dx.doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>.
- Unggul et al. (2022). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. ... Ekonomi, Sosial & ..., [jurnalintelektiva.com](https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/895), <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/895>.
- Winataputra, US. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, US. (2016). *Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Moral Kemasyarakatan, [Vol 1 No 1](https://doi.org/10.21067/jmk.vii.1184). [ejournal.unikama.ac.id](http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1184), [https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1184](http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1184). <https://doi.org/10.21067/jmk.vii.1184>.